



Kejari Proses Laporan Dugaan Korupsi DD

KETAPANG—Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ketapang, Fajar Yulianto, mengatakan bahwa pihaknya terus memproses laporan dugaan tindak penyalahgunaan dana desa di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi.

"Masyarakat Desa Sejahtera telah melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Ketapang. Atas perintah pimpinan ke Bidang Pidana

Khusus sudah ditindaklanjuti. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan pengumpulan dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi untuk menemukan apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak di Desa Sejahtera," kata Fajar.

Pihaknya telah melaksanakan rapat secara berkala bersama pimpinan. Laporan terakhir dari Bidang Pidana Khusus bahwa proses laporan tersebut, diungkapkan dia, masih dalam tahap penyelidikan. "Karena masih



Fajar Yulianto

ada beberapa pihak yang harus dipanggil lagi dan sebagainya," jelas Fajar.

Dia menegaskan, dalam

memproses laporan ini, pihaknya akan terbuka. Jika nanti dinaikkan ke tahap penyidikan, berarti, menurut dia, sudah ada perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana korupsi. "Namun untuk saat ini memang belum tahap penyidikan. Jadi masih ditingkat penyelidikan. Mohon waktu karena secara SOP juga memang masih ada waktu," ungkapnya.

"Nanti jika memang dinaikkan ke tahap penyidikan, kapan waktu dan sebagainya-

ya, kami harus ke Bidang Pidaus dulu. Tapi intinya kita ada SOP jangka waktunya," lanjut Fajar.

Sebelumnya, beberapa masyarakat Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, melaporkan dugaan korupsi dana desa di tempatnya. Laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada 24 Juni 2022 masa audit tahun anggaran 2021.

Pada laporan itu diungkap

bahwa di antaranya terdapat belanja atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp395.274.934.

Kemudian terdapat pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas negara dan kas daerah sebesar Rp26.245.564. Terdapat PPH pasal 21 atas kegiatan barang dan jasa yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp883.819. Selanjutnya terdapat PPn atas

belanja kegiatan barang dan jasa yang kurang setor ke kas negara sebesar Rp22.917.609. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan barang dan jasa di desa sebesar Rp25.819.000

Selain itu ada juga laporan warga Desa Sejahtera bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang diduga fiktif, dianggarkan tapi tidak dikerjakan. Serta bangunan yang diduga dikerjakan tidak sesuai lantaran dikerjakan tidak selesai tapi anggarannya dicairkan 100 persen. (afi)